

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini Turki hadir dan berperan sebagai kekuatan Islam dalam lingkup Global. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, selama berpuluh-puluh tahun Turki sempat menjadi sebuah negara sekuler berkiblat Barat pasca runtuhnya kerajaan Utsmani. Kembalinya posisi Turki sebagai salah satu sumber dari kekuatan Islam berkaitan dengan eksistensi dari peran dan upaya Rəcəp Tayyib Erdoğan dan Partai AKP yang berhasil memenangkan pemilu, serta mengalahkan Partai CHP yang notabene nya pendukung fanatik Kemal Pasha. Dari keberhasilan Erdoğan dalam memenangkan pemilu tersebut, Turki banyak sekali mengubah kebijakan yang telah ada sebelumnya, utamanya dari kebijakan yang bersifat liberal dan sekuler menjadi kebijakan yang pro terhadap Islam (Mada, 2020).

Di bawah pemerintahan Erdoğan Turki mengalami peningkatan dan kemajuan yang cukup pesat hingga membuat Turki disegani kembali karena kekuatannya. Perubahan baik tersebut membuat nama Erdoğan mencuat hingga membuat nama nya masuk sebagai salah satu pemimpin terbaik dunia. Erdoğan sukses merebut hati rakyat Turki melalui pengadaan progam-progam dan agenda Islamisasi dan ekonomi yang luar biasa. Progam Islamisasi tersebut dimunculkan melalui kebijakan-kebijakan politik yang dibawa dengan damai oleh Erdoğan (Marzaman, 2011).

Untuk kebijakan luar negeri, Erdoğan berperan besar dalam mendorong perjuangan masyarakat Islam di seluruh dunia, khususnya bagi yang mengalami krisis konflik seperti di Palestina, Erdoğan sangat lantang dalam menyerukan dukungan terhadap Palestina serta mengkritik kebijakan Israel terhadap Palestina. Melihat bagaimana upaya Erdoğan dalam mendorong kemajuan Islam lewat kebijakan yang telah ia tetapkan, menjadi sebuah ironi ketika Erdoğan secara tiba-tiba mengeluarkan kebijakan kontroversial yakni normalisasi hubungan bilateral dengan Israel pada tahun 2016.

Kebijakan tersebut tentu menuai banyak pro dan kontra mengingat hal ini tampak bertentangan dengan kebijakan-kebijakannya yang lain, karena seperti yang kita ketahui Israel merupakan negara yang berkonflik dengan Bangsa Palestina yang notabene nya negara muslim saudara Turki, sehingga jika dilihat kebijakan ini sangatlah bertolak belakang dengan dukungan yang selama ini telah Erdogan berikan terhadap Palestina (Sawhani, 2018).

Sebenarnya Turki telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 1949, berbeda dengan negara mayoritas muslim lainnya yang kebanyakan menolak Israel, Turki justru mengakui keberadaan dan kedaulatan Israel. Relasi yang terjalin antara Turki dan Israel pada masa kepemimpinan Erdogan memang sempat mengalami masalah pada tahun 2010 karena adanya pembekuan hubungan, ketika itu Turki sengaja membekukan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai akibat dari penyerangan militer Israel terhadap kapal Mavi Marmara yang mana membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza, hal itu berakibat pada tewasnya 10 aktivis dari Turki. Israel kemudian dituntut untuk membayar kerugian disertai kewajiban untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Sayangnya, Israel memilih untuk menolak sehingga memicu kemarahan Erdogan yang berakibat pada pembekuan hubungan bilateral Turki dan Israel. (Sawhani, 2018). Namun ketika pembekuan tersebut berjalan kurang lebih lima tahun, Turki dan Israel kembali memulai normalisasi hubungan bilateral tepatnya di tahun 2016. Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan besar yakni mengenai alasan mengapa Presiden Erdogan memutuskan untuk melakukan perbaikan hubungan tersebut (Farid, 2017).

Kasus tentang diberlakukannya kebijakan normalisasi hubungan antara dua negara yang cukup lama mengalami benturan seperti halnya yang terjadi kepada Turki dan Israel ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti, terlebih lagi jika kasus tersebut berfokus pada pemerintah Eksekutif, maka akan sangat menarik apabila pengkajian tersebut menggunakan pendekatan yang berfokus pada tingkat analisis individu, serta menggunakan paradigma konstruktivisme yang berfokus pada nilai-nilai yang tertanam pada aktor, dalam konteks ini Erdogan sebagai aktor politik (Pradana, 2016). Dalam menggunakan

pendekatan ini, perlu diketahui terlebih dahulu alasan individu melancarkan tindakan politik dan apa relevansi tindakan tersebut dengan kebutuhan, kehendak, citra, nilai, dan keyakinan manusia. Sebagai individu yang menempati posisi sebagai presiden dan berwenang dalam menetapkan kebijakan. Teori yang digunakan oleh penulis sebagai alat analisa adalah teori persepsi yang dirumuskan oleh Ole Holsti (Salim, 2017). Tentunya akan menjadi hal yang begitu menarik ketika penulis dapat merelevansikan atau menghubungkan antara indicator dari teori tersebut dan hubungannya dengan kasus ini serta kebijakan yang dikeluarkan Erdogan (Pradana, 2016).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis kemudian mengajukan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni : “Mengapa Presiden Erdogan memutuskan untuk melakukan perbaikan hubungan bilateral dengan Israel ?”.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Nurmamurti yang mana menganalisis mengenai kebijakan Luar negeri Trump terhadap Perang dagang Amerika Serikat -China, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan pelaku (individu) perumusan disebut sebagai pembuat kebijakan atau decision makers mempunyai kemampuan untuk dapat mempengaruhi hasil kebijakan. penelitian tersebut menganalisis model kepemimpinan Donald Trump melalui pendekatan ideosinkretik di mana hal ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana Trump merumuskan kebijakan serta bagaimana karakter Trump yang berpotensi mempengaruhi perannya sebagai perumus kebijakan luar negeri (Nurmamurti, et al., 2022). Selain itu, pada penelitian tentang kebijakan *open door policy* oleh Erdogan ditemukan bahwa kepribadian Erdogan sebagai pembuat keputusan dipertimbangkan (Wiryawan, Azzahra, Nurshadrina, & Imanjaya, 2021). Menurut Fadhil, kebijakan luar negeri dapat dijelaskan dengan menggunakan karakteristik pribadi pemimpin politik, dengan

mencari indikator nasionalisme, kepercayaan pada kemampuan untuk mengendalikan masalah, kebutuhan akan pengaruh, kebutuhan untuk berafiliasi, kompleksitas konseptual, dan ketidakpercayaan orang lain yang akan mengacu pada model kepemimpinan, yang dianalisis melalui sikap, penilaian, dan perkataannya (Fadil, 2020). Pada penelitian Pradana mengenai kepemimpinan Soeharto yang berdampak pada perubahan kebijakan luar negeri Indonesia yakni pemutusan hubungan luar negeri dengan Cina menemukan bahwasanya, perubahan kebijakan dipengaruhi oleh persepsi seorang pemimpin yang timbul karena adanya nilai, identitas, kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh pemimpin tersebut sehingga mempengaruhi pandangan pemimpin tersebut terhadap peristiwa atau hal yang terjadi dan berakhir pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin tersebut, keyakinan dan nilai yang Suharto pegang berupa nilai budaya jawa yang begitu kental yang ia pelajari sememnjak masih kecil yang mana hal tersebut mempengaruhi prespektif nya dalam memandang Cina sebagai sebuah ancaman (Pradana, 2016). Di samping itu, dalam penelitian Saslim (2017) masih dengan teori yang sama yakni teori persepsi Ole Holsti dengan studi kasus kebijakan normalisasi hubungan diplomatic Amerika Serikat - Kuba Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Kuba dipengaruhi oleh persepsi Barack Obama yang dibentuk oleh sistem kepercayaannya. Persepsi Obama terhadap Kuba dapat dibagi menjadi beberapa poin penting. Pertama, Kuba saat ini bukan ancaman. Kedua, perbedaan ideologi bukan halangan kerjasama di abad ke-21. Ketiga, perang ideologi tidak lagi penting di abad ke-21. Keempat, mencapai perubahan ke arah yang lebih baik dapat dilakukan dengan kolaborasi. Kelima, pentingnya nilai-nilai demokrasi di negara tersebut (Saslim, 2017).

D. KERANGKA BERPIKIR

Dalam hubungan diplomatik negara normalisasi didefinisikan sebagai proses untuk mewujudkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengakhiri konflik lewat beberapa cara seperti genjatan senjata, perjanjian

damai, atau membangun hubungan diplomatic. Menurut Barston normalisasi dilihat sebagai proses yang melibatkan; pengakuan dari kebutuhan akan ukuran untuk mengurangi ketegangan atau gesekan, dan mereka perkenalan; promosi hubungan yang lebih baik; dan isolasi, penahanan atau resolusi - seluruhnya atau sebagian - dari sumber utamaperselisihan atau ketegangan.

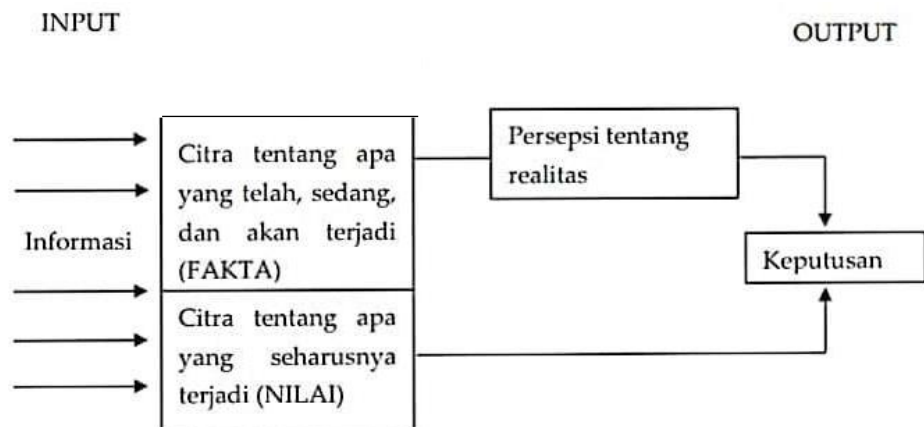
Kasus tentang diberlakukannya kebijakan normalisasi hubungan antara dua negara yang cukup lama mengalami benturan seperti halnya yang terjadi kepada Turki dan Israel ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti, terlebih lagi jika kasus tersebut berfokus pada pemerintah Eksekutif, maka akan sangat menarik apabila pengkajian tersebut menggunakan pendekatan yang berfokus pada tingkat analisis individu, serta menggunakan paradigma konstruktivisme yang berfokus pada nilai-nilai yang tertanam pada aktor, dalam konteks ini Erdogan sebagai aktor politik (Pradana, 2016). Dalam menggunakan pendekatan ini, perlu diketahui terlebih dahulu alasan individu melancarkan tindakan politik dan apa relevansi tindakan tersebut dengan kebutuhan, kehendak, citra, nilai, dan keyakinan manusia. Sebagai individu yang menempati posisi sebagai presiden dan berwenang dalam menetapkan kebijakan (Salim, 2017).

Pada Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan atau sudut pandang konstruktivisme dan juga teori persepsi yang dirumuskan (Holsti, 1985:304). Konstruktivisme adalah bagian dari teori kritis (critical theory) yang dapat mengelaborasi dan menjelaskan bahwa setiap keputusan, tindakan dan kebijakan saat ini sangat berkaitan dengan dilakukannya penelusuran pengalaman-pengalaman yang telah terjadi sebelumnya di masa lampau. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kenyataan social yang terjadi sekarang adalah hasil atas semua tindakan yang telah dilakukan di masa lampau. Sebenarnya pandangan konstruktivisme ini cukup mirip dengan realisme, tetapi konstruktivisme berfokus pada ide, norma, identitas, dan hal-hal immaterial (non material) lainnya (Buzan & Hansen, 2009). Hal ini mengikuti arahan Kratochwil, yang meyakini bahwa konstruksi kehidupan bersama dalam

masyarakat internasional adalah proses terjalannya interaksi antar aktor yang dibentuk oleh sejumlah faktor seperti minat (interest), identitas (identity), niat (intention), dan nilai (values) kemudian berpotensi menjadi alasan satu subjek menganggap yang lain sebagai 'teman' atau 'musuh' (Kratochwil, 1989).

Untuk menggali penjelasan yang lebih dalam, tulisan ini juga menggunakan teori persepsi yang dikemukakan Ole Holsti. Teori persepsi yang dirumuskan Ole Holsti ini memakai pendekatan psikologi yang menonjolkan apa nilai sistem keyakinan dan persepsi yang ada pada pemimpin negara sangat sangat berpengaruh terhadap bagaimana proses pengambilan kebijakan pemimpin tersebut. Para pengambil kebijakan sama halnya manusia lainnya, juga turut dipengaruhi oleh beragam langkah psikologi yang memberikan dampak dan pengaruh terhadap persepsi/ pandangannya mengenai suatu objek atau kondisi. Misalnya, keinginan untuk merasionalisasi tindakan, untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan dan lain sebagainya (Sannit, 2018).

Teori persepsi adalah interpretasi aktor politik pembuat keputusan terhadap suatu isu. Interpretasi ini didapat lewat fakta dan data-data yang ada yang kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh para aktor politik untuk selanjutnya dituangkan ke dalam kebijakan luar negeri suatu negara (Holsti, 2006). Fakta yang dimaksud adalah informasi dan data tentang keadaan yang terjadi di lingkungan nasional atau internasional, sedangkan nilai adalah aspek pribadi yang melekat pada diri pengambil keputusan seperti pendidikan, pengaruh keluarga, pengalaman dan lain sebagainya. Persepsi memiliki pengaruh yang besar terhadap pembuatan kebijakan luar negeri, utamanya di negara-negara otokratis di mana kekuasaan politik hanya dipegang oleh satu orang (Pradana, 2016).



Bagan 1: Teori Presepsi Holsti (dalam Russet & Star, sebagaimana dikutip oleh Mas'ood 1991:21)

Menurut Holsti, dalam teori presepsi terdapat tiga komponen persepsi, di antaranya nilai, keyakinan, dan pengetahuan atau fakta (Jones, 1992). Nilai merupakan aksentuasi terhadap pernyataan tertentu dibandingkan dengan fakta /realitas lain. Nilai yang menetapkan harga relatif pada objek dan situasi. Keyakinan adalah fakta, terbukti atau diketahui. Keyakinan seringkali dilandaskan pada penerimaan informasi yang sebelumnya datang dari lingkungan, walaupun hal tersebut berbeda dengan data sendiri. Hal ini merupakan sebuah pernyataan analitis yang menghubungkan unit data dalam model yang diuji. Sedangkan, fakta atau pengetahuan yang ada dan yang diketahui, berasal dari informasi yang diterima dari lingkungan (Pradana, 2016). Dengan menggunakan teori presepsi sebagai alat atau instrumen analisa tentunya akan menjadi hal yang begitu menarik ketika penulis dapat merelevansikan atau menghubungkan antara indicator dari teori tersebut dan hubungan nya dengan kasus ini serta kebijakan yang dikeluarkan Erdogan (Pradana, 2016).

Bagan Analisis Teori Presepsi Pada Studi Kasus Normalisasi Hubungan Turki-Israel



Dalam konteks ini kita ketahui bersama bahwa nilai yang dianut oleh Erdogan dan tampak cukup menonjol adalah nilai Islam dan nilai nasionalisme. Nasionalisme sendiri merupakan ideologi / paham yang dilandasi kesadaran kolektif untuk mencintai bangsa dan negara untuk menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu bangsa, dengan mewujudkan konsep identitas bersama bagi sekelompok orang yang memiliki tujuan atau aspirasi dalam mengejar kepentingan bangsanya. Seperti keinginan untuk memelihara kekuatan, keamakmuran atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan serta melindungi bangsa baik secara internal maupun eksternal (Zulfikar, 2021). Di mana jika ditelusuri lebih dalam nilai nasionalisme yang tertanam dalam diri Erdogan tumbuh sejak usia muda karena pengaruh lingkungan, pendidikan, pola didik yang mana terus berkembang dan menguat hingga saat ini (Rofii, 2020). Berdasarkan dengan teori yang penulis gunakan, dapat dikorelasikan bahwa dalam kasus ini informasi yang diinput adalah berupa fakta-fakta dan kenyataan

kondisi keamanan ekonomi dan politik Turki mengalami penurunan atau degradasi sejak kebijakan pemutusan hubungan bilateral dengan Israel yang kemudian diinput dan diproses dalam sistem keyakinan Erdogan yakni nasionalisme yang membentuk persepsi, pandangan dan keinginan Erdogan sehingga menuntun Erdogan untuk dapat mewujudkan Turki menjadi lebih makmur kuat dan bergengsi sehingga dikeluarkan kebijakan normalisasi tersebut (Harahap, 2018).

E. HIPOTESIS

Berdasarkan dengan kerangka teori dan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis yakni: “Mengapa Presiden Erdogan memutuskan untuk melakukan perbaikan hubungan bilateral dengan Israel?”. Maka hipotesa yang bisa diambil untuk penelitian ini berdasarkan dengan perubahan kebijakan tersebut adalah kebijakan tersebut disebabkan oleh nasionalisme Erdogan yang lebih dominan dalam memimpin Turki dibandingkan dengan islamisme, dominansi nasionalisme tersebut mempengaruhi perubahan persepsi nya dalam memandang Turki, nasionalisme Erdogan mendorong timbulnya keinginan dan kepentingan untuk dapat mewujudkan Turki menjadi negara yang besar maju dan makmur, namun cita-cita tersebut tidak cukup untuk *direalisasikan* hanya dengan melalui rute agama (berdasarkan nilai Islam saja), sehingga Erdogan perlu menggunakan berbagai cara termasuk menempuh normalisasi hubungan dengan Israel. Dalam konteks ini, nilai nasionalisme yang dianut oleh Erdogan lah mengarahkan nya untuk lebih berpikir rasional sehingga keluarlah output berupa kebijakan normalisasi hubungan dengan Israel.

F. TUJUAN PENELITIAN

Tulisan ini berangkat dari isu normalisasi hubungan diplomatic antara Turki dan Israel pasca sebelumnya sempat dibekukan oleh Erdogan karena insiden kapal Mavi Marmara. Isu ini menjadi sebuah masalah karena Erdogan seolah tidak konsisten dalam menjalankan kebijakannya. Oleh karenanya, tulisan ini berupaya mengetahui alasan mengapa Presiden Erdogan

memutuskan untuk melakukan perbaikan hubungan bilateral dengan Israel serta menjelaskan alasan perubahan kebijakan luar negeri tersebut.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian haruslah memiliki lingkup dan jangkauan. Hal ini bertujuan agar objek yang diteliti menjadi jelas serta tidak keluar dari wacana serta terhindar dari kerancuan pada wilayah dan pengertian persoalan. Untuk membatasi masalah yang akan diteliti, penulis membatasi jangka waktu kajian agar tidak bersimpangan dengan permasalahan yang diangkat yakni tahun 2010-2018. Karena pada tahun jangka tersebut tahun 2010 merupakan awal mula permasalahan hubungan Turki dan Israel yang berakibat pada pembekuan hubungan, sedangkan 2016-2018 merupakan tahun di mana proses normalisasi dilaksanakan.

H. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil eksplorasi dan investigasi penelitian yang lebih mendalam, artikel ini akan menggunakan metode pendekatan kualitatif tepatnya deskriptif kualitatif. Seperti yang sudah paparkan oleh Cassel dan Simon dalam bukunya yang berjudul "*Qualitative Methods and analysis in Organizational Research Guide*", metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian ilmu sosial yang berupaya untuk melakukan interpretasi dan deskripsi secara tepat dan akurat mengenai arti dan esensi dari gejala yang terjadi dalam konteks sosial. Metode kualitatif menegaskan akan krusialnya penelusuran data-data lewat sumber-sumber yang ada baik secara tertulis maupun lisan (Taylor, Bogdan, & DeVault, 2015).

Adapun data yang dicari dalam penelitian ini berupa statement dan pernyataan Erdogan dari pidato nya yang didapat melalui pengkajian terhadap sumber literatur, seperti berita-berita, artikel, laporan-laporan, jurnal, dokumen resmi dan juga data lain yang diperkirakan dapat menunjang penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data yang kemudian akan dilanjutkan dengan validasi data dan fakta dengan teori yang ada. Data yang divalidasi kemudian digunakan untuk menggambarkan

bagaimana nilai-nilai konstruktivis dapat mempengaruhi kebijakan Erdogan (Akim & Ruhiat, 2020).

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan disusun kedalam lima bab, antara lain :

Bab I: Akan berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Pada bab ini akan membahas mengenai hubungan yang terjalin antara Turki dan Israel di era pemerintahan Erdogan.

Bab III: Akan membahas mengenai Islam sebagai nilai sekaligus cita-cita Erdogan dalam membangun Turki

Bab IV: Akan membahas mengenai aspek nasionalisme yang mempengaruhi persepsi Erdogan terhadap Israel dan kebijakan normalisasi hubungan bilateral Turki dan Israel.

Bab V: Berupa kesimpulan keseluruhan isi materi penelitian dan sekaligus berisi rangkuman dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya